

DAFTAR PUSTAKA

Aswardi, 2001. Analisis Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan UU NO. 25 Tahun 1999 di Kabupaten Lampung Selatan. Bungan Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMPYKPN, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik, 2010 – 2013. Pesawaran Dalam Angka. Propinsi Lampung.

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen DalamNegeri RI dan Fisipol UGM 1991. Pengukuran Kemampuan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab. Jakarta.

Boediono, 1999, Mengenal Beberapa Metode Kuantitatif dalam Ilmu Ekonomi, BPFE, Yogyakarta.

Booth, Anne. 2000. Upaya-Upaya Untuk Mendesentralisasi Kebijakan Perpajakan. Masalah Kemampuan Perpajakan, usaha Perpajakan dan Perimbangan Keuangan, Hubungan Pusat – Daerah dalam Pembangunan (Rangkuman Collin Mac Andrews dan IcksulAmal), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Brahmantio dan Tri Wibowo, 2002, Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Surakarta), Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 6, No.1.

Bahl, Roy., 1999. *Implementation Rules For Fiscal Decentralization* Published Of *The World Bank*, New York.

Bird, Richard dan Vaillancourt, Francois. 2000. Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang, Cetakan 1, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.(Terjemahan).

Departemen Keuangan RI, 2005. Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Jakarta.

E. Koswara, 1999. Menyongsong Kebijaksanaan dan Implementasi Otonomi Luas dan Bertanggung jawab Menurut UU NO. 22 tahun 1999. Makalah Seminar ISEI Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Repelita VII, Yogyakarta.

Elia Radianto, 1997. Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II suatu Studi di Maluku, Prisma Vol.3.

Halim, Abdul, 2001. "Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah". Yogyakarta. UPP AMP YKPN.

Halim, Abdul, 2004. "Manajemen Keuangan Daerah". Edisi Revisi. UPP AMPYKPN.

Ibnu Syamsi, 1994. Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara, Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Kaloh, J. 2002. Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Khusaini, Mohammad, 2006. Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. BPFE Unibraw, Malang.

Mardiasmo, 1999. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik, PAU Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta.

Mahi, Raksaka et al. *Fiscal Decentralizations : Its Impact on Cities Growth*. Jakarta : Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol 2, No. 1, Juli 2001

Mahi, Raksaka, 2005. Manajemen Keuangan di Era Otonomi. Usahawan No. 12TH XXXIV Desember 2005

Mudrajad Kuncoro, 1997. Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan. UPP AMD YKPN, Yogyakarta.

Mudrajad Kuncoro, 2004. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategis dan Peluang. Erlangga, Jakarta.

Nurhayani, 2010. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Rengat.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Tentang Dana Perimbangan

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan
Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah

Republik Indonesia , (2004-a), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia , (2004-b), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rubenstein, Ross, 2002. *Budgeting and Fiscal Management*. International
Training Program, GSU, Atlanta.

Sidik, Machfud , 2001. Studi Empiris Desentralisasi Fiskal :Prinsip, Pelaksanaan
di Berbagai Negara, serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan Personil, Peralatan,
Pembiayaan dan Dokumentasi Sebagai Konsekuensi Kebijakan Pemerintah.
Batam :Sidang Pleno X ISEI

Sidik, Machfud , 2002. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai
Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. Makalah Seminar Setahun Implementasi
Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta, 13 Maret 2002.

Sadono Sukirno, 2000. Makro ekonomi Modern – Perkembangan Pemikiran dari
Klasik Hingga Keynesian Baru, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suparmoko 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah* Edisi Pertama. Andi, Yogyakarta.

Simanjuntak, Thamrin, 2001. *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah ,Bunga Rampai Manajemen Keuangan daerah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah

Wahyu Widayat, 2000. Maksimisasi PAD Sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah ,*Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, STIE YKPN.

Widodo. 2001. *Analisa Rasio Keuangan pada APBD Boyolali, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.